



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 947 -BKAD/ 2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

- 3.1 Telah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 3.3 Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah

BAB IV PENUTUP

- KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 yaitu :
- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
 - b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja tahun 2023.
- KEENAM : Sekretaris Badan, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome.

23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 29);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.48-
Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 051.2/Kep.246 –
BKAD/2022 tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana
Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
3. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor
051.23/2112/Bappelitbangda tanggal 13 Juni 2023
tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan
Aset Daerah Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran
dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai
berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan
Daerah
- 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan
Masyarakat

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Seri D);

- KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 947 -BKAD/ 2023

TANGGAL : 2 Oktober 2023

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renja SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, kerangka pendanaan dan pagu indikatif serta urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran untuk menyikapi isu – isu yang berkembang dan mengimplementasikannya ke dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BKAD Kabupaten Cirebon menyusun dokumen Perubahan Renja Tahun 2023 yang merupakan dokumen penyesuaian perencanaan tahunan berisi perubahan pagu anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan serta perubahan target kinerja dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023. Perubahan Renja BPKAD Tahun 2023 didasarkan pada hasil evaluasi Renja BPKAD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Perubahan Renja BKAD Tahun 2023 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja BKAD Tahun 2023 ini adalah :

1. Mengkaji Rencana Kerja BKAD berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan, evaluasi pencapaian target kinerja serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja BKAD Tahun 2023 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja BKAD Tahun 2023 yaitu untuk merumuskan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Tahun 2023 sangat terbatas, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas dalam pelaksanaannya sehingga dapat selesai sesuai dengan rencana aksi dan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Renja ini, dapat diketahui capaian kinerja dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sehingga dapat dilaksanakan percepatan dalam pencapaian target kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya dokumen Perubahan Renja ini, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.

BUPATI CIREBON,


IMRON



2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 ini adalah Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon sebagai pedoman dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Landasan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 361 ayat (3), Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);



21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 29);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 29).

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja BKAD Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.1 Landasan Hukum
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Dalam RPJMD Tahun 2019–2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah bertanggungjawab memberikan kontribusi terhadap pencapaian misi Bupati Cirebon yang nomor empat yaitu

Meningkatnya Produktifitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Oleh Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah. Kontribusi tersebut ditandai dengan ditetapkannnya tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

- a) Indikator Tujuan :
 - 1. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2. Peningkatan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan.
- b) Indikator Sasaran :
 - 1. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD;
 - 2. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD;
 - 3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D;
 - 4. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP;
 - 5. Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi;
 - 6. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya;
 - 7. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.



Target capaian indikator kinerja utama (IKU) ini dicapai dengan kontribusi dari 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 (enam) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan;
- b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 3 (tiga) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan;
- c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (satu) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 sampai dengan triwulan II menghasilkan realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp.7.445.345.620,00 atau 48,93%, dari total anggaran sebesar Rp.15.216.937.503,00 Adapun realisasi anggaran dari masing-masing sub kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagaimana pada tabel berikut :



Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Tahun 2023		Capaian Kinerja Sampai Dengan Semester I (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Yang Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 7 + 8		K	Rp
0.00.															
NON BIDANG URUSAN															
0.00.01.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	1.839.090.000	52,31	305.600.838	100	1.741.556.230	100	574.182.800	100	2.315.739.030	100	126

Penutupan Renja BKAD Tahun 2023



			Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	5.167.628.750	92,13	632.647.588	100	3.287.675.958	100	1.321.409.000	100	4.609.084.958	100	89
			Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	88.000.000	0	0	100	60.820.000	100	0	100	60.820.000	100	69
			Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	9.136.500.000	44,84	21.103.600	100	248.902.751	100	7.191.506.403	100	7.440.409.154	100	81



			Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	192.500.000	21,19	27.096.400	100	276.235.350	100	102.455.500	100	378.690.850	100	197
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	230.000.000	82,69	3.732.600,978	100	13.892.513,705	100	0	100	13.892.513,705	100	6.040
0.00.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	1	192.500.000	0	27.096.400	1	276.235.350	1	102.455.500	1	378.690.850	100	197



0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	4	15.000.000	2	8.059.600	4	20.864.400	4	13.032.400	4	33.896.800	100	226
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	3	10.000.000	0	616.000	3	13.080.500	3	8.596.600	3	21.677.100	100	217
0.00.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	4	10.000.000	1	3.615.000	4	12.118.500	4	8.328.600	4	20.447.100	100	204
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	1	10.000.000	0	0	1	8.250.200	1	0	1	8.250.200	100	83
0.00.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	2	10.000.000	0	0	2	9.881.100	2	0	2	9.881.100	100	99

Penutupan Renja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	40	5.000.000	19	1.908.000	40	5.000.000	40	4.838.000	40	9.838.000	100	197
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	9	132.500.000	4	12.897.800	9	89.964.900	9	67.659.900	9	157.624.800	100	119
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	1	9.126.500.000	0	3.750.337.578	1	13.922.810.905	1	7.182.354.403	1	21.105.165.308	100	231
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, (Satuan: Orang/Bulan - Non Kumulatif)	52	9.093.000.000	45	3.732.600.978	48	13.892.513.705	52	7.155.278.603	52	21.047.792.308	100	231
0.00.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	9	10.000.000	8	3.744.000	9	4.965.000	9	9.346.800	9	14.311.800	100	143

Penutupan Renja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	4	5.000.000	4	1.704.000	4	1.922.700	4	4.320.800	4	6.243.500	100	125
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	1	10.000.000	1	8.697.600	1	5.000.000	1	8.772.600	1	13.772.600	100	138
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	1	8.500.000	1	3.591.000	1	1.981.700	1	4.635.600	1	6.617.300	100	78
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	1	10.000.000	0	3.367.000	1	218.605.551	1	9.152.000	1	227.757.551	100	2.278



0.00.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	1	2.500.000	0	1.722.000	1	3.291.050	1	2.442.000	1	5.733.050	100	229
0.00.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	12	2.500.000	6	615.000	2	3.958.600	12	2.310.000	12	6.268.600	100	251
0.00.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	2	5.000.000	1	1.030.000	2	5.855.900	2	4.400.000	2	10.255.900	100	205
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	1	318.000.000	0	0	1	60.820.000	1	0	1	60.820.000	100	19
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, (Satuan: Paket - Non Kumulatif)	75	88.000.000		0	65	46.847.500	75	0	75	46.847.500	100	53



0.00.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, (Satuan: Orang - Non Kumulatif)	75	230.000.000	0	0	0	0	75	0	75	0	100	0
0.00.01.2.06.	Administrasi UmumPerangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	1	1.839.090.000	0	305.600.838	1	1.741.556.230	1	574.182.800	1	2.315.739.030	100	126
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket - Non Kumulatif)	20	33.275.000	11	5.480.900	18	45.574.110	20	9.987.400	20	55.561.510	100	167
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket - Non Kumulatif)	20	525.000.000	0	0	9	479.869.749	20	0	20	479.869.749	100	91
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, (Satuan: Paket - Non Kumulatif)	20	113.135.000	11	5.610.050	20	105.871.381	20	9.998.200	20	115.869.581	100	102
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, (Satuan: Paket - Non Kumulatif)	2	25.000.000	0	0	2	31.680.000	2	0	2	31.680.000	100	127

Penutupan Revisi BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, (Satuan: Paket - Non Kumulatif)	20	146.550.000	13	23.314.500	18	77.427.747	20	36.246.000	20	113.673.747	100	78
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	7	116.410.000	7	19.800.000	7	155.754.000	7	39.600.000	7	195.354.000	100	168
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, (Satuan: Paket - Non Kumulatif)	73	411.515.000	45	166.906.800	70	135.858.800	73	347.384.000	73	483.242.800	100	117
0.00.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	22	48.205.000	12	4.753.000	220	9.165.000	22	14.010.000	22	23.175.000	100	48
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	60	220.000.000	38	59.553.588	60	91.813.562	60	92.593.200	60	184.406.762	100	84
0.00.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	3	200.000.000	2	20.182.000	3	136.426.500	3	24.364.000	3	160.790.500	100	80



0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	1	300.000.000	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, (Satuan: Unit - Non Kumulatif)	2	300.000.000		0	0		0	2		0	2	100	0
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	1	1.826.350.000	0	503.535.347	1	1.678.420.853	1	1.103.441.000	1	2.781.861.853	100	152	
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	3	503.950.000	3	152.023.001	3	271.967.756	3	312.288.000	3	584.255.756	100	116	



0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	46	532.400.000	38	175.304.550	46	426.977.840	46	222.505.000	46	649.482.840	100	122
0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	3	790.000.000	3	176.207.796	3	403.570.892	3	568.648.000	3	972.218.892	100	123
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	1	3.041.278.750	0	129.112.241	1	1.609.255.105	1	217.968.000	1	1.827.223.105	100	60
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, (Satuan: Unit - Non Kumulatif)	16	141.290.000	16	53.548.900	16	131.134.474	16	111.540.000	16	242.674.474	100	172



0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, (Satuan: Unit - Non Kumulatif)	27	99.988.750	18	31.521.424	27	43.612.730	27	61.292.000	27	104.904.730	100	105
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, (Satuan: Unit - Non Kumulatif)	2	2.300.000.000	2	24.915.317	2	816.848.400	2	25.175.000	2	842.023.400	100	37
0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, (Satuan: Unit - Non Kumulatif)	5	500.000.000	5	19.126.600	1	229.801.352	5	19.961.000	5	249.762.352	100	50
5.02.	KEUANGAN													
5.02.02.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100	3.541.875.000	0	458.945.690	100	2.155.683.320	100	1.166.885.000	100	3.322.568.320	100	94
		Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	2.807.000.000	27,72	494.085.300	100	2.437.573.187	100	827.316.200	100	3.264.889.387	100	116

Pendataan Rerija BKAD Tahun 2023



			Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	2.977.000.000	25	206.213.064	100	1.930.881.345	100	508.449.600	100	2.439.330.945	100	82
			Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	1.229.773.384	17,71	576.427.836	100	1.709.038.276	100	1.166.402.700	100	2.875.440.976	100	234
			Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	0	0	0	100	1.449.545.763	100	0	100	1.449.545.763	100	0
5.02.02.2.01.		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, (Satuan: BA)	1	6.348.875.000	0	953.030.990	1	5.423.696.830	1	1.994.201.200	1	7.417.898.030	100	117

Pembelan Rerja BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	2	399.300.000	0	202.267.800	2	408.215.000	2	267.332.000	2	675.547.000	100	169
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	2	432.575.000	0	63.364.400	2	443.331.320	2	155.039.200	2	598.370.520	100	138
5.02.02.2.01.03.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	74	450.000.000	0	0	74	354.373.455	74	113.184.000	74	467.557.455	100	104
5.02.02.2.01.04.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	178	900.000.000	72	55.821.200	178	334.650.130	178	199.885.000	178	534.535.130	100	59
5.02.02.2.01.05.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	74	450.000.000	0	28.505.200	375	67.064.080	74	32.410.000	74	99.474.080	100	22
5.02.02.2.01.06.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	178	900.000.000	72	76.036.300	479	206.869.441	178	121.249.800	178	328.119.241	100	36

Penutupan Renja BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.01.07.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	4	756.000.000	0	141.777.000	280	516.972.602	4	311.292.600	4	828.265.202	100	110
5.02.02.2.01.08.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	10	1.007.000.000	3	362.227.800	300	760.263.267	10	506.181.400	10	1.266.444.667	100	126
5.02.02.2.01.09.		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	10	478.000.000	0	9.087.490	452	324.291.010	10	246.010.400	10	570.301.410	100	119
5.02.02.2.01.10.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	1	74.000.000	0	0	36	7.210.124	1	0	1	7.210.124	100	10
5.02.02.2.01.13.		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, (Satuan: Orang - Non Kumulatif)	269	502.000.000	0	13.943.800	601	486.988.260	269	41.616.800	269	528.605.060	100	105

Penutupan Renja BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, (Satuan: BA)	1	2.977.000.000	0	206.213.064	1	2.549.986.785	1	508.449.600	1	3.058.436.385	100	103
5.02.02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	4	635.000.000	0	14.518.000	4	500.338.870	4	136.044.000	4	636.382.870	100	100
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	444	282.000.000	222	29.178.000	444	292.016.600	444	53.388.000	444	345.404.600	100	122
5.02.02.2.02.04.	Penatausahaan Penbiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Penbiayaan Daerah, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	2	88.000.000	0	0	2	135.945.200	2	0	2	135.945.200	100	154



5.02.02.2.02.05.		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	6	198.000.000	3	27.566.864	6	121.164.095	6	55.508.800	6	176.672.895	100	89
5.02.02.2.02.06.		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	4	330.000.000	2	65.549.600	4	398.365.224	4	136.637.600	4	535.002.824	100	162



5.02.02.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	3	162.000.000	0	0	0	0	53.576.851	3	0	3	53.576.851	100	33
5.02.02.2.02.08.		Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	2	147.000.000	0	0	0	0	113.921.080	2	0	2	113.921.080	100	77



5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	876	394.000.000	438	69.400.600	876	315.553.425	876	126.871.200	876	442.424.625	100	112
5.02.02.2.02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, (Satuan: Orang - Non Kumulatif)	222	741.000.000	0	0	236	451.129.541	222	0	222	451.129.541	100	61
5.02.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, (Satuan: BA)	1	1.229.773.384	0	576.427.836	1	2.597.676.856	1	1.166.402.700	1	3.764.079.556	100	306
5.02.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	3	147.000.000	0	9.542.000	3	62.680.600	3	60.330.000	3	123.010.600	100	84

Pembelan Rerja BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	876	602.000.000	438	352.997.200	896	540.819.337	876	370.139.500	876	910.958.837	100	151
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	2	147.000.000	0	0	2	40.070.500	2	35.954.000	2	76.024.500	100	52
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	2	433.000.000	2	213.888.636	2	264.731.100	2	226.371.200	2	491.102.300	100	113
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	2	260.000.000	0	0	85	214.445.862	2	178.896.000	2	393.341.862	100	151



5.02.02.2.03.08.		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	1	80.000.000	0	0	1	54.423.299	1	21.660.000	1	76.083.299	100	95
5.02.02.2.03.09.		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	2	240.000.000	0	0	2	237.943.700	2	94.800.000	2	332.743.700	100	139
5.02.02.2.03.10.		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	2	586.000.000	0	0	4	226.606.370	2	178.252.000	2	404.858.370	100	69
5.02.02.2.03.11.		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota, (Satuan: Orang - Non Kumulatif)	255	130.000.000	0	0	0	0	255	0	255	0	100	0



5.02.03.	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	PROGRAM PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan dimanfaatkan dengan baik/benar, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	1.268.000.000	0	234.619.229	97,8	1.383.452.793	100	651.153.700	100	2.034.606.493	100	160
			Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	4.042.000.000	15,97	756.005.097	100	3.406.081.793	100	1.707.176.600	100	5.113.258.393	100	127
			Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola barang milik daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0
5.02.03.2.01.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Satuan: BA)	1	5.310.000.000	0	990.624.326	1	4.841.433.824	1	2.358.330.300	1	7.199.764.124	100	136

Pembelan Renja BKAD Tahun 2023



5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	2	215.000.000	0	103.634.500	260	153.176.505	2	118.070.900	2	271.247.405	100	126
5.02.03.2.01.02.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	1	380.000.000	0	0	73	242.649.154	1	112.482.800	1	355.131.954	100	93
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	2	160.000.000	2	76.524.500	148	113.728.809	2	83.093.300	2	196.822.109	100	123
5.02.03.2.01.04.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	4	380.000.000	0	44.233.000	170	103.613.350	4	94.794.000	4	198.407.350	100	52
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	74	366.000.000	0	76.817.800	75	467.053.420	74	248.365.000	74	715.418.420	100	195
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	74	600.000.000	0	27.064.000	74	139.590.313	74	85.467.200	74	225.057.513	100	38

Pembelan Rerja BKAD Tahun 2023



5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	2	1.268.000.000	1	234.619.229	450	798.920.878	2	651.153.700	2	1.450.074.578	100	114
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	5	600.000.000	3	135.127.900	5	944.703.718	5	398.987.600	5	1.343.691.318	100	224
5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	2	131.000.000	1	37.623.000	13	141.198.682	2	94.055.000	2	235.253.682	100	180
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	5	500.000.000	2	45.697.300	5	189.246.818	5	146.781.000	5	336.027.818	100	67
5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	876	283.000.000	438	112.622.100	2	222.249.494	876	151.552.400	876	373.801.894	100	132

Penutupan Renja BKAD Tahun 2023



5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	2	67.000.000	1	47.410.997	0	27.817.800	2	65.286.800	2	93.104.600	100	139
5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, (Satuan: Orang - Non Kumulatif)	364	360.000.000	364	49.250.000	0	0	364	108.240.600	364	108.240.600	100	30



Dari tabel diatas, untuk kegiatan yang realisasi output dan realisasi anggaran masih minim dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan dan penganggaran kegiatan-kegiatan tersebut dijadwalkan pada berikutnya sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran kas DPA SKPD Tahun Anggaran 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan indikator kinerja terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Analisis Kinerja Pelayanan BKAD Tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra dan IKU Tahun 2019-2024 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dan menyajikan :

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja.

Upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan



dan menyampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Bupati. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas :

- I. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- II. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain :

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya Pemerintah Daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Laporan Keuangan Interim dapat disusun untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mengetahui besarnya realisasi anggaran sampai periode tertentu, mengetahui posisi keuangan atas aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan pada suatu waktu cut off penyusunan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan interim Pemerintah Daerah juga sebagai alat evaluasi manajemen terhadap sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, apakah telah menyajikan informasi keuangan secara akurat sesuai transaksi yang diinput dalam bentuk buku jurnal. Apabila terdapat perbedaan antara transaksi yang diinput dan informasi keuangan yang dihasilkan, akan dapat segera dilakukan perbaikan dan koreksi sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Buku dapat disajikan secara wajar. Langkah dan upaya Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrual Tahun 2022 antara lain :

1. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrual;
2. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis Akrual;
3. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, capaian indikator kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian dapat **“tercapai”**.



Namun demikian secara kualitas persentase penyajian laporan keuangan SKPD yang mendukung Opini BPK RI dapat dipertanggungjawabkan, melalui pendampingan asistensi penyusunan Laporan Keuangan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Sehingga dapat dianggap seluruh Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD) sebanyak 73 SKPD, yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan telah dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD secara wajar sesuai SAP berbasis akrual. Oleh karena itu, capaian kinerja Indikator Utama (IKU) perubahan pada sasaran **“Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP”** sampai dengan Tahun 2022 telah tercapai 100,00% yaitu telah disampaikan dokumen LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2021 baik unaudited maupun audited yang merupakan laporan konsolidasian 73 SKPD sebelum tanggal 31 Maret 2022. Opini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Arus Kas (LAK);
3. Neraca;
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
5. Laporan Operasional (LO);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yaitu standar yang mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari saji material. Suatu pemeriksaan meliputi :

- 1) Bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 2) Penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 3) Penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan;
- 4) Penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan; serta
- 5) Penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan.



Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Meskipun Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhasil meraih capaian opini atas Laporan Keuangan yang cukup baik, namun diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan perbaikan yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pada Laporan Keuangan melalui antara lain :

- a. Peningkatan komitmen pimpinan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual;
- b. Menyempurnakan peraturan terkait kebijakan akuntansi dan mengembangkan aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi;
- c. Peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi;
- d. Peningkatan sinergi antar unit terkait;
- e. Percepatan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
- f. Pemberdayaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) secara optimal mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas APBN/APBD dalam rangka mewujudkan efektivitas pengendalian intern yang memadai.



2. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya

Upaya dalam mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara berkelanjutan, karena penanganan barang milik daerah yang tidak tertib berpotensi kehilangan dan/atau penyalahgunaan barang milik daerah, misalnya yang berupa tanah, kendaraan, ataupun barang milik daerah lainnya yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah. Demikian pula dalam aspek penatausahaan barang milik daerah, potensi terjadinya ketidakwajaran penyajian nilai aset tetap maupun aset persediaan dan berimplikasi pada opini laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari sisi penguatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran juga perlu dioptimalkan melalui program dan kegiatan penyusunan standar harga barang maupun penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan dan pemeliharaan.

a. Tertib Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah.

- Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah bersesuaian dengan rencana kerja SKPD, yang dilakukan penelaahan terhadap usulan rencana kebutuhan barang milik daerah yang diajukan oleh SKPD sebelum ditetapkan.
- Penetapan Standar Harga Barang untuk kebutuhan penyusunan anggaran belanja barang, melakukan survei harga barang kepada pelaku usaha atau melalui pendekatan yang ditetapkan, dengan sesuai penggolongan, kode barang milik daerah, dan kode rekening belanja barang.

b. Penatausahaan Barang Milik Daerah.

- Penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah, dilaksanakan sesuai kaidah peraturan perundang-undangan diantaranya harus bersesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penatausahaan dimulai di tingkat Unit Kerja, SKPD, dan selanjutnya dikonsolidasikan di tingkat Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah dilakukan secara lengkap, akurat, rinci, dan tepat waktu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas penatausahaan barang milik daerah melalui pembinaan kepada seluruh pengurus barang secara berkelanjutan.



- Rekonsiliasi terhadap laporan barang milik daerah yang disampaikan oleh seluruh SKPD dan Unit Kerja, untuk memastikan kesesuaian barang milik daerah yang dilaporkan terhadap indikator realisasi belanja modal, laporan operasional, data pendistribusian, pengalihan status penggunaan, data penerimaan yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah, dan lain sebagainya.
 - Tersedianya data base barang milik daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Penilaian dalam rangka penatausahaan barang milik daerah, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- c. Pengamanan Barang Milik Daerah
- Tersedianya data pemanfaatan barang milik daerah.
 - Pengamanan administratif melalui kodifikasi barang milik daerah.
 - Kelengkapan dan penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah. Kelengkapan bukti kepemilikan merupakan fungsi pengamanan barang milik daerah yang kewenangannya dilakukan oleh SKPD.
 - Inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan paling kurang setiap lima tahun.
 - Pengamanan secara fisik berupa pemagaran, pemasangan papan informasi aset, dan penjagaan aset-aset tertentu. BKAD melakukan koordinasi untuk mendorong SKPD atau melalui Kuasa Pengguna Barang harus optimal mengamankan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, dengan berkoordinasi dengan SKPD teknis dengan kewenangan terkait lainnya.
 - Tertib penggunaan barang milik daerah sesuai tugas dan fungsi melalui Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD.
 - Koordinasi penyelesaian sengketa tanah, baik litigasi maupun non litigasi.
 - Penertiban barang milik daerah yang dikuasai pihak lain. SKPD melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya melalui pemantauan dan penertiban.
 - Tersedianya sarana yang memadai untuk pengamanan secara fisik barang milik daerah, diantaranya penyimpanan barang persediaan, dokumen kepemilikan, barang milik daerah dalam proses penjualan, dan lain sebagainya.



d. SDM yang handal dan kompeten

- Pengelolaan barang milik daerah ditunjang dengan SDM dengan pengetahuan dan keterampilan baik, untuk tertibnya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemusnahan dan penghapusan, pengamanan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian.
- Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur pengurus barang SKPD dan unit kerja melalui kegiatan pelatihan pengelolaan barang milik daerah. - Koordinasi dan petunjuk teknis kepada seluruh SKPD.
- Informasi dan pengungkapan permasalahan pengelolaan barang milik daerah.

e. Pengelolaan barang milik daerah Berbasis Teknologi Informasi

- Tersedianya aplikasi pengelolaan barang milik daerah berbasis Teknologi Informasi.
- Cakupan aplikasi pengelolaan barang milik daerah untuk menunjang kebutuhan pengelolaan barang milik daerah.
- Integrasi aplikasi pengelolaan barang milik daerah dengan aplikasi lain terkait khususnya aplikasi pengelolaan keuangan daerah, kepegawaian, dan lain-lain.
- Kehandalan alur dan konektivitas data antara aplikasi pengelolaan barang milik daerah dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

Terkait dengan kriteria pengamanan barang milik daerah salah satunya disebabkan proses pensertifikatan beberapa aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang belum rampung sampai dengan tahun 2022. Dalam rangka pengamanan aset, pensertifikatan merupakan poin yang sangat penting, namun dalam proses pelaksanaannya membutuhkan koordinasi kepada instansi terkait Untuk kedepannya, Badan Keuangan dan Aset akan terus melakukan upaya pengamanan aset daerah secara optimal dan berkesinambungan setiap tahunnya khususnya meningkatkan koordinasi dengan pihak BPN Kabupaten Cirebon dalam proses pensertifikatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik. Oleh karena itu, capaian kinerja Indikator Utama (IKU) pada sasaran ***“Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya”*** sampai dengan Tahun 2022 telah tercapai 100,00% yaitu telah disampaikan dokumen LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2021 baik unaudited maupun audited yang didalamnya telah memuat laporan barang milik daerah 73 SKPD yang telah dikonsolidasikan keberadaan



asetnya, kelengkapan bukti dan nilai aset tersebut dan dapat diyakini kewajarannya serta tepat waktu dalam penyajiannya sebelum tanggal 31 Maret 2022.

3. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 105 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.
- b. Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Berdasarkan Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- b. Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.



- c. DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD. Indikator Utama (IKU) perubahan pada sasaran **“Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD”** sampai dengan Tahun Anggaran 2022 penetapannya untuk APBD Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2022 sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tepat waktu sehingga capaiannya 100,00%.

4. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Indikator Utama (IKU) perubahan pada sasaran **“Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD”** sampai dengan Tahun Anggaran 2022 mengalami sedikit keterlambatan. Persetujuan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 23 September 2022 dan penetapan APBD perubahan setelah selesai dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Oktober 2022. Sehingga dalam menentukan target dan realisasi capaian sasaran Indikator Utama (IKU) perubahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah bulan Nopember 2022 untuk target capaian dan realisasinya pada bulan tersebut juga sehingga capainnya sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100,00%.

5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut :

- a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya;
- b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima;



- c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk :
1. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 2. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 3. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
 4. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila :
 - i. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau;
 - ii. pengeluaran tersebut melampaui pagu;
 - iii. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Target dan realisasi capaian Indikator Utama (IKU) pada sasaran ***“Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D”*** sebesar 100,00% dikarenakan proses penyerapan anggaran 73 SKPD setiap waktu dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencairannya paling lama 2 hari dari tanggal ajuan SPP/SPM. Dalam pelaksanaannya Badan Keuangan dan Aset Daerah menggunakan aplikasi Verifikasi SPM dan SIKATON untuk mempercepat proses verifikasi ajuan dari SKPD.

6. Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi

Target dari indikator Indikator Utama (IKU) pada sasaran ***“Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi”*** sebesar 69,90% atau 195 ajuan tanah yang akan disertifikatkan dan yang telah masuk ke BPN pada Tahun 2022 sebanyak 63 bidang sehingga capaiannya sebesar 57,95%. Dan target yang ditetapkan tidak tercapai 100,00% pada Tahun 2022. Dari 1339 bidang yang baru bersertifikat sebanyak 620 bidang (616 sertifikat ditambah Tahun 2021 = 1 sertifikat dan Tahun 2022 = 3 sertifikat). Faktor penyebab dokumen sertifikat belum jadi dikarenakan pihak BPN belum bisa memproses ajuan tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon dikarenakan kekurangan tenaga personil BPN dilapangan dalam melakukan proses verifikasi ulang terhadap dokumen kepemilikan awal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk proses pensertifikatan tanah.



7. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Cirebon. Oleh sebab itu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon harus mampu melayani dan berkerja secara profesional, di sisi lain sebagai Pengelola dan sebagai Pengadministrasian di bidang Keuangan dan Aset Daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala yaitu dengan mengadakan survey kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang dalam masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan selain dengan wawancara langsung yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada penerima layanan yaitu seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, masyarakat umum yang memanfaatkan layanan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 (sembilan) unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. **Persyaratan Pelayanan**, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Prosedur Pelayanan**, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. **Waktu Pelayanan**, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/Tarif**, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;



5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, adalah hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. **Kompetensi Pelaksana**, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
7. **Perilaku Pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. **Penanganan Pengaduan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. **Sarana dan prasarana**, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan pada unit pelayanan :

- a) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Daerah;
- b) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Daerah (Gaji dan Tunjangan);
- c) Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
- d) Rekonsiliasi dan Konsolidasi Belanja Laporan Keuangan SKPD;
- e) Rekonsiliasi dan Konsolidasi Pendapatan Laporan Keuangan SKPD;
- f) Rekonsiliasi Aset;
- g) Penjualan Barang Milik Daerah (BMD);
- h) Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD) Rusak Berat;
- i) Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD);
- j) Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD);
- k) Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Rusak Berat;
- l) Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD;
- m) Rekonsiliasi Persediaan;
- n) Pinjam Pakai BMD pada Pengelola.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan tersebut di atas, dilakukan triwulanan pada Tahun 2022 dengan mengedarkan kuesioner kepada responden 73 (tujuh puluh tiga) OPD yang menjadi pengguna layanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :



1. Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dipersepsikan **“Baik”** oleh penggunaanya. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Triwulan IV yang diperoleh berkisar di antara 62,51 – 81,25. Nilai SKM yang diperoleh dari 9 (sembilan) unsur pelayanan adalah **80,879**;
 2. Semua unsur menunjukkan hasil yang baik dengan nilai rata-rata Indeks **3,235**. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diberikan kepada 72 (tujuh puluh dua) OPD **“memuaskan.”**
 3. Hasil rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mulai dari Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2022 adalah $(80,805 + 81,426 + 80,538 + 80,879)/4 = \mathbf{80,912 \text{ (Baik)}}$ sedangkan hasil nilai rata-rata indeks mulai dari Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2022 adalah $(3,232+3,257+3,222+3,235)/4 = \mathbf{3,237 \text{ (Memuaskan)}}$.
Target dari indikator kinerja utama (IKU) pada sasaran **“Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah”** sebesar 80.50 Poin dengan capaian realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 80.879 Poin atau 100,47%. Perbandingan realiasi kinerja dan capaian kinerja BKAD Tahun 2021 dengan Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :
 - a. Sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Tahun 2022 dengan 2021 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan;
 - b. Sasaran meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan pada Tahun 2022 dengan 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,98%;
 - c. Sasaran meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tahun 2022 dengan 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,88%. Perbandingan rata-rata capaian kinerja sasaran Tahun 2022 dengan Tahun 2021 mengalami trend penurunan sebesar 1,29% sehingga diperlukan adanya perbaikan-perbaikan pada kinerja BKAD untuk Tahun 2023.
- Analisis pencapaian kinerja pelayanan BKAD sampai dengan Tahun 2022 dan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :



Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah		Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	80,00 Poin	80,00 Poin	80,50 Poin	80,50 Poin	82,00 Poin	80,00	80,00	80,87	100,00	100,00	
1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah		Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
			Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan		Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	59,71	69,78	69,90	84,47	100,00	52,63	53,25	57,95	100,00	100,00	
			Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah di masa datang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang.

Tuntutan adanya peningkatan kemampuan aparatur yang memiliki kompetensi dan profesionalitas tinggi menjadi hal mutlak untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Tersedianya aparatur yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan profesionalitas aparatur pemerintah daerah. Terwujudnya aparatur yang profesional diindikasikan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Di samping itu, terciptanya efektivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan tentunya akan dapat semakin meningkatkan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Termasuk dengan pemanfaatan teknologi informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang semakin memadai merupakan salah satu indikator berjalannya pelayanan yang baik. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sangat berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan mendesak harus dapat dipenuhi demi terwujudnya pelayanan prima.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja.

Dengan memperhatikan semua sumber daya yang ada, permasalahan dan hambatan yang menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Sistem informasi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi belum sepenuhnya bekerja dengan optimal. Adanya sistem pengelolaan keuangan yang baru yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahap awal penerapan masih harus melakukan orientasi dan penyesuaian.



- Kondisi tersebut memerlukan sumberdaya yang lebih besar baik berupa waktu, tenaga, maupun pemikiran;
2. Beberapa regulasi yang menjadi acuan teknis dan detail pengelolaan keuangan dan aset daerah yang harus selalu di *up-date* karena perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi tugas BKAD untuk mengawal implementasi atas peraturan-peraturan tersebut;
 3. Kapasitas dan kapabilitas pegawai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam rangka meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel;
 4. Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun perangkat daerah lain mengharuskan BKAD senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan secara terus menerus;
 5. Pemanfaatan aset daerah yang belum optimal sehingga potensi manfaat yang mestinya bisa diraih tidak dapat tercapai;
 6. Lemahnya proses pengawasan aset dari aspek pemeliharaan pengawasan maupun dokumentasi bukti kepemilikan;
 7. Lemahnya adaptasi Pejabat Pengelola Keuangan SKPD terhadap transformasi peraturan perundangan-undangan dan dinamikanya;
 8. Pengamanan aset daerah dalam pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini menyebabkan persentase tanah yang sudah memiliki sertifikat sangat kecil sehingga pencapaian indikator pada Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK tidak dapat tercapai;
 9. Penatausahaan aset daerah belum dilaksanakan secara optimal. Penatausahaan barang milik daerah belum terintegrasi dengan *e-budgeting*.



2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja BKAD Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. BKAD melaksanakan review pada rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 yang disandingkan dengan kebutuhan Perangkat Daerah dengan hasil bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Perubahan Renja BKAD Tahun 2023 sudah tercantum semua dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023. Review terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan BKAD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 2.3 sebagai berikut :



Tabel. 2.3
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rancangan Perubahan RKPD			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0	NON URUSAN				9.120.402.080,00	NON URUSAN				10.243.165.023,00	
0.00.	NON BIDANG URUSAN				9.120.402.080,00	NON BIDANG URUSAN				10.243.165.023,00	
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah		100 Prosen	574.182.800,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah		100 Prosen	1.051.907.320,00	
		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah		100 Prosen	1.321.448.700,00		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah		100 Prosen	1.769.178.500,00	

Perubahan Renc BKAD Tahun 2023



		Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparaturnya terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	0,00		Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparaturnya terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	0,00	
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	7.122.311.580,00		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	7.319.633.703,00	
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	102.459.000,00		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	102.445.500,00	
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	-		Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	0,00	



0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 BA	102.459.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 BA	102.445.500,00			
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	13.035.400,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	13.032.400,00	
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKAD KAB. CIREBON	3 Dokumen	8.596.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKAD KAB. CIREBON	3 Dokumen	8.596.600,00	
0.00.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	8.328.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	8.328.600,00	
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BKAD KAB. CIREBON	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BKAD KAB. CIREBON	1 Dokumen	-	
0.00.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	-	

Perubahan Renja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	BKAD KAB. CIREBON	40 Laporan	4.838.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	BKAD KAB. CIREBON	40 Laporan	4.838.000,00	
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD KAB. CIREBON	9 Laporan	67.660.400,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD KAB. CIREBON	9 Laporan	67.649.900,00	
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 BA	7.113.159.500,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 BA	7.311.549.403,00	
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD KAB. CIREBON	52 Orang/ Bulan	7.086.083.700,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD KAB. CIREBON	42 Orang/ Bulan	7.285.283.603,00	
0.00.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD KAB. CIREBON	9 Dokumen	9.346.800,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD KAB. CIREBON	9 Dokumen	9.346.800,00	
0.00.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	4.320.800,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	4.320.800,00	
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKAD KAB. CIREBON	1 Laporan	8.772.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKAD KAB. CIREBON	1 Laporan	8.727.600,00	

Penutupan Rerija BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKAD KAB. CIREBON	1 Laporan	4.635.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKAD KAB. CIREBON	1 Laporan	3.870.600,00	
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 BA	9.152.080,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 BA	8.084.300,00	
0.00.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BKAD KAB. CIREBON	1 Dokumen	2.442.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BKAD KAB. CIREBON	1 Dokumen	1.722.000,00	
0.00.01.2.03.05.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD KAB. CIREBON	12 Laporan	2.310.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD KAB. CIREBON	12 Laporan	2.298.000,00	
0.00.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD KAB. CIREBON	2 Laporan	4.400.080,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD KAB. CIREBON	2 Laporan	4.064.300,00	
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 BA	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 BA	0,00	
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKAD KAB. CIREBON	75 Paket	-	Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKAD KAB. CIREBON	67 Paket	-	

Pembekalan Reraja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BKAD KAB. CIREBON	75 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BKAD KAB. CIREBON	50 Orang	-
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 BA	574.182.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 BA	1.051.907.320,00
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	20 Paket	9.987.400,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	20 Paket	9.987.400,00
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	20 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	11 Paket	430.447.720,00
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	20 Paket	9.998.200,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	20 Paket	9.998.200,00
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	2 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	2 Paket	-
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	20 Paket	36.246.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	7 Paket	53.034.500,00
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	7 Dokumen	39.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	7 Dokumen	39.600.000,00
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	73 Paket	347.384.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	73 Paket	347.384.000,00

Puskesmas Reris BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.06.08.	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	BKAD KAB. CIREBON	22 Laporan	14.010.000,00	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	BKAD KAB. CIREBON	22 Laporan	14.010.000,00	
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD KAB. CIREBON	60 Laporan	92.593.200,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD KAB. CIREBON	60 Laporan	123.081.500,00	
0.00.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD KAB. CIREBON	3 Dokumen	24.364.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD KAB. CIREBON	3 Dokumen	24.364.000,00	
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	-	
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	2 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	2 Unit	-	
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	1.103.455.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	1.266.760.500,00	
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	3 Laporan	312.288.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	3 Laporan	327.684.000,00	

Penutupan Renja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	46 Laporan	222.519.100,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	46 Laporan	265.317.000,00	
0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	3 Laporan	568.648.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKAD KAB. CIREBON	3 Laporan	673.759.500,00	
0.00.01.2.09.	Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	217.993.600,00	Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	502.418.000,00	
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKAD KAB. CIREBON	16 Unit	111.540.000,00	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKAD KAB. CIREBON	16 Unit	111.540.000,00	
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKAD KAB. CIREBON	27 Unit	61.317.600,00	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKAD KAB. CIREBON	27 Unit	61.292.000,00	
0.00.01.2.09.09.	Penyelenggaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKAD KAB. CIREBON	2 Unit	25.175.000,00	Penyelenggaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKAD KAB. CIREBON	2 Unit	254.625.000,00	

Pembahasan Renja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKAD KAB. CIREBON	5 Unit	19.961.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKAD KAB. CIREBON	5 Unit	74.961.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN				6.027.410.400,00	UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN				8.128.743.700,00	
5.02.	KEUANGAN				6.027.410.400,00	KEUANGAN				8.128.743.700,00	
5.02.02.	PROGRAM PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD		100 Prosen	1.166.885.000,00	PROGRAM PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD		100 Prosen	2.067.957.900,00	
		Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD		100 Prosen	827.316.200,00		Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD		100 Prosen	999.056.600,00	
		Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran		100 Prosen	508.449.600,00		Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran		100 Prosen	595.146.500,00	
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP		100 Prosen	1.166.402.700,00		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP		100 Prosen	1.231.336.000,00	
		Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah		100 Prosen	-		Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah		100 Prosen	-	
5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1 BA	1.994.201.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1 BA	3.067.014.500,00	

Pendataan Renja BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	267.332.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	354.002.000,00	
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	155.039.200,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	345.832.200,00	
5.02.02.2.01.03.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BKAD KAB. CIREBON	74 Dokumen	113.184.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BKAD KAB. CIREBON	74 Dokumen	172.712.600,00	
5.02.02.2.01.04.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BKAD KAB. CIREBON	178 Dokumen	199.885.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BKAD KAB. CIREBON	178 Dokumen	280.417.500,00	
5.02.02.2.01.05.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	BKAD KAB. CIREBON	74 Dokumen	32.410.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	BKAD KAB. CIREBON	74 Dokumen	32.410.000,00	
5.02.02.2.01.06.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	BKAD KAB. CIREBON	178 Dokumen	121.249.800,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	BKAD KAB. CIREBON	178 Dokumen	94.873.700,00	
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	311.292.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	479.941.200,00	
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD KAB. CIREBON	10 Dokumen	506.181.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD KAB. CIREBON	10 Dokumen	623.765.400,00	

Penutupan Rerja BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKAD KAB. CIREBON	10 Dokumen	246.010.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKAD KAB. CIREBON	10 Dokumen	343.077.500,00	
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BKAD KAB. CIREBON	1 Dokumen	-	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BKAD KAB. CIREBON	1 Dokumen	0,00	
5.02.02.2.01.13.	Penbinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Penbinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD KAB. CIREBON	269 Orang	41.616.800,00	Penbinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Penbinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD KAB. CIREBON	269 Orang	339.982.400,00	
5.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		1 BA	508.449.600,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		1 BA	595.146.500,00	
5.02.02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	136.044.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	136.044.000,00	
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD KAB. CIREBON	444 Dokumen	53.388.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD KAB. CIREBON	444 Dokumen	103.960.000,00	
5.02.02.2.02.04.	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	-	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	-	



5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD KAB. CIREBON	6 Dokumen	55.508.800,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD KAB. CIREBON	6 Dokumen	91.633.700,00	
5.02.02.2.02.06.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	136.637.600,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	136.637.600,00	
5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	BKAD KAB. CIREBON	3 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	BKAD KAB. CIREBON	3 Laporan	-	



5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	-	Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	-	
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD KAB. CIREBON	876 Dokumen	126.871.200,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD KAB. CIREBON	876 Dokumen	126.871.200,00	
5.02.02.2.02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD KAB. CIREBON	222 Orang	-	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD KAB. CIREBON	222 Orang	-	
5.02.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1 BA	1.166.402.700,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1 BA	1.231.336.000,00	
5.02.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BKAD KAB. CIREBON	3 Laporan	60.330.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BKAD KAB. CIREBON	3 Laporan	60.330.000,00	

Pembelan Renja BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BKAD KAB. CIREBON	876 Dokumen	370.139.500,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BKAD KAB. CIREBON	876 Dokumen	370.139.500,00	
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BKAD KAB. CIREBON	2 Laporan	35.954.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BKAD KAB. CIREBON	2 Laporan	35.954.000,00	
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BKAD KAB. CIREBON	2 Laporan	226.371.200,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BKAD KAB. CIREBON	2 Laporan	226.371.200,00	
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	178.896.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	178.785.600,00	
5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD KAB. CIREBON	1 Dokumen	21.660.000,00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD KAB. CIREBON	1 Dokumen	21.660.000,00	

Pendataan Renja BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.03.09.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	94.800.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	94.800.000,00	
5.02.02.2.03.10.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	178.252.000,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	243.295.700,00	
5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	BKAD KAB. CIREBON	255 Orang	-	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	BKAD KAB. CIREBON	255 Orang	-	
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan dimanfaatkan dengan baik/benar	100 Prosen	651.180.300,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan dimanfaatkan dengan baik/benar	100 Prosen	948.136.200,00			
		Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar	100 Prosen	1.707.176.600,00		Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar	100 Prosen	2.287.110.500,00			
		Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola barang milik daerah	100 Prosen	0,00		Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola barang milik daerah	100 Prosen	0,00			

Penutupan Renja BKAD Tahun 2023



	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
5.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 BA	2.358.356.900,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 BA	3.235.246.700,00	
5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	118.070.900,00	Penyusunan Standar Harga	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	151.425.700,00	
5.02.03.2.01.02.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	1 Dokumen	112.482.800,00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	1 Dokumen	17.549.300,00	
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	83.093.300,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	2 Dokumen	99.762.600,00	
5.02.03.2.01.04.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	94.794.000,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	4 Dokumen	94.794.000,00	
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	74 Laporan	248.365.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	74 Laporan	248.842.400,00	
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	74 Laporan	85.467.200,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	74 Laporan	99.861.700,00	
5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	2 Laporan	651.180.300,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	2 Laporan	948.136.200,00	
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	5 Laporan	398.987.600,00	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	5 Laporan	513.987.600,00	

Pendataan Rerja BKAD Tahun 2023



5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	2 Laporan	94.055.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	2 Laporan	94.055.000,00		
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	5 Dokumen	146.781.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	5 Dokumen	496.781.000,00		
5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	876 Laporan	151.552.400,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD KAB. CIREBON	876 Laporan	151.552.400,00		
5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BKAD KAB. CIREBON	2 Laporan	65.286.800,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BKAD KAB. CIREBON	2 Laporan	65.286.800,00		
5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD KAB. CIREBON	364 Orang	108.240.600,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD KAB. CIREBON	364 Orang	253.212.000,00		
J U M L A H					15.147.812.480,00	J U M L A H					18.371.908.723,00	

Pembelan Renja BKAD Tahun 2023



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

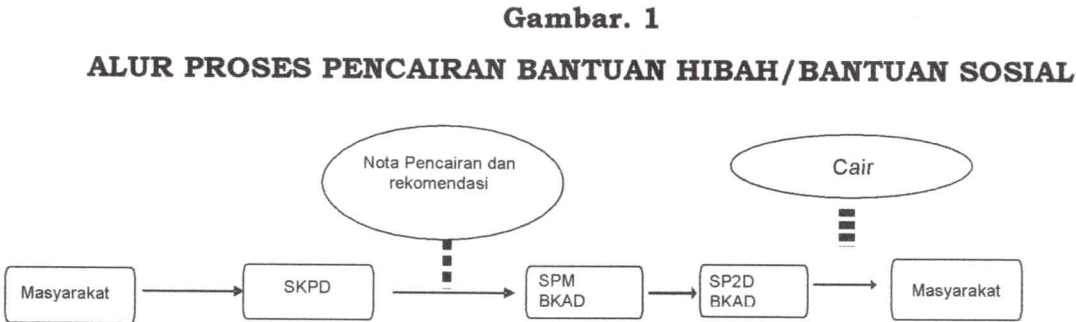
Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penyelenggara pemerintahan juga menampung aspirasi langsung program/kegiatan dari masyarakat umum sebagai para pemangku kepentingan. Hal ini telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Urutan dan tata cara untuk pendeskripsianannya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

- a. Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial dari masyarakat disampaikan dengan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Cirebon. Untuk selanjutnya diberikan disposisi kepada Sekda selaku Ketua TAPD. TAPD melakukan verifikasi dan mendistribusikan proposal permohonan dari masyarakat ke SKPD terkait sesuai bidang dan tugasnya. Untuk berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon;
- b. SKPD terkait melakukan evaluasi teknis terhadap proposal dan kelengkapan persyaratan lainnya yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi SKPD;
- c. Rekomendasi dari SKPD ditujukan kepada TAPD sebagai bahan dalam menyusun Pertimbangan TAPD berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang akan disampaikan kepada Bupati. Setelah menerima Pertimbangan TAPD, Bupati dapat menyetujui atau menolak Pertimbangan TAPD tersebut;
- d. Pertimbangan TAPD yang disetujui menjadi dasar dalam pencantuman calon penerima hibah dan bantuan sosial dalam KUA/PPAS APBD, sedangkan pertimbangan TAPD yang tidak disetujui dikembalikan ke TAPD;
- e. Berdasarkan Perda APBD dan Perbup APBD, Bupati Cirebon menetapkan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk SK Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial.



BKAD selaku PPKD melaksanakan dan menatausahakan Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial seperti pada gambar dibawah ini :



Dapat dijelaskan lebih lanjut alur pencairan sesuai dengan gambar diatas adalah sebagai berikut :

1. Proposal Pencairan ditujukan kepada Bupati Cirebon yang disampaikan melalui SKPD Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial;
2. SKPD terkait melakukan evaluasi terhadap proposal beserta kelengkapan persyaratan dengan menerbitkan Nota Pencairan yang dilampiri :
 - Berita Acara;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - Pakta Integritas;
 - Surat Keterangan Transfer;
 - Kwitansi;
 - Dokumen lainnya.
3. Nota Pencairan tersebut disampaikan kepada BKAD untuk diterbitkan SPP, SPM, dan SP2D;
4. Setelah proses pencairan masyarakat akan menerima transfer dana Hibah dan Bantuan Sosial melalui Bank Jabar Banten Cabang Sumber.

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Keuangan adalah "Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif".

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif
Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien
Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel
Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif
Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.



Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BKAD Kabupaten Cirebon untuk :

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif; dan
2. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset daerah.

Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Program Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berikut identifikasi kebijakan nasional :

Tabel. 3.1
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Kepastian dan Penegakan Hukum	APBN	
2.	Keamanan dan Ketertiban	APBN	
3.	Politik dan Demokrasi	APBN	
4.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	APBN	

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, maka dalam menyusun program kegiatannya BKAD mengacu pada kebijakan nasional “Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku
- Tujuan 2 : Terwujudnya Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Cirebon Tahun 2019 –2024 adalah :

- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- Sasaran 2 : Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan
- Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berikut pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini :



Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku		Peningkatan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah		Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen
			Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
		Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundang-an	Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	39,73 Prosen	49,73 Prosen	59,71 Prosen	69,78 Prosen	69,90 Prosen	84,47 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
2	Terwujudnya Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten		Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
		Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	75,00 Poin	78,00 Poin	80,00 Poin	80,00 Poin	80,50 Poin	80,50 Poin	82,00 Poin	82,00 Poin



Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah . Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 adalah :

a) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator :

1. Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD



6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Bahan/Material
8. Fasilitas Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b) PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Indikator :

1. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelolaan keuangan daerah;
2. Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD;
3. Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD;
4. Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran.
5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP.

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan KUA dan PPAS
2. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
8. Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah



13. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

14. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
4. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
6. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas
7. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
8. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

9. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
6. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
8. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
9. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
10. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

c) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Indikator :

1. Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar;
2. Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar;
3. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola barang milik daerah.

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah
6. Inventarisasi Barang Milik Daerah
7. Pengamanan Barang Milik Daerah
8. Penilaian Barang Milik Daerah
9. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah



11. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
13. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota



Tabel. 3.3
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH												
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang
						Tolok Ukur		Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	(9)	(10)	(11) = (10-9)
0	NON URUSAN									9.120.402.080,00	10.243.025.803,00	1.122.623.723,00
0.00.	NON BIDANG URUSAN									9.120.402.080,00	10.243.025.803,00	1.122.623.723,00
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik			Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	100 Prosen	574.182.800,00	1.029.576.400,00	455.393.600,00

Perubahan Rincis BKAD Tahun 2023



		Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik			Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	100 Prosen	1.321.448.700,00	1.789.482.500,00	468.033.800,00
		Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik			Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	100 Prosen	0,00	0,00	-
		Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik			Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	100 Prosen	7.122.311.580,00	7.321.511.403,00	199.199.823,00



	Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik			Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	100 Prosen	102.459.000,00	102.455.500,00	(3.500,00)
	Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	-	0,00	0,00	0,00
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	102.459.000,00	102.455.500,00	(3.500,00)



0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	13.035.400,00	13.032.400,00	(3.000,00)
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	8.596.600,00	8.596.600,00	0,00
0.00.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	8.328.600,00	8.328.600,00	0,00
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00

Penutupan Renja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerjanya SKPD			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Capaian kinerjanya dan Ikhtisar Realisasi kinerjanya SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerjanya dan Ikhtisar Realisasi kinerjanya SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerjanya dan Ikhtisar Realisasi kinerjanya SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerjanya dan Ikhtisar Realisasi kinerjanya SKPD	40 Laporan	40 Laporan	4.838.000,00	4.838.000,00	0,00
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi kinerjanya Perangkat Daerah			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Evaluasi kinerjanya Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerjanya Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	67.660.400,00	67.659.900,00	-500,00
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerjanya Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerjanya Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	7.122.311.580,00	7.321.511.403,00	199199823,00

Pembukan Renja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	43 Orang/ Bulan	7.086.083.700,00	7.285.283.603,00	199.199.903,00
0.00.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	9.346.800,00	9.346.800,00	0,00
0.00.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4.320.800,00	4.320.800,00	0,00
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.772.600,00	8.772.600,00	0,00

Pendataan Rerja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.635.600,00	4.635.600,00	0,00
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	9.152.080,00	9.152.000,00	-80,00
0.00.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.442.000,00	2.442.000,00	0,00
0.00.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00

Pendataan Renja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.400.080,00	4.400.000,00	-80,00
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	0,00	0,00	0,00
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	67 Paket	0,00	0,00	0,00
0.00.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Renja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	574.182.800,00	1.029.576.400,00	455.393.600,00
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	9.987.400,00	9.987.400,00	0,00
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	7 Paket	0,00	424.905.300,00	424.905.300,00
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	9.998.200,00	9.998.200,00	0,00

Penutupan Rujia BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	0,00	0,00	0,00
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	36.246.000,00	36.246.000,00	-
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	39.600.000,00	39.600.000,00	-
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	73 Paket	73 Paket	347.384.000,00	347.384.000,00	0,00

Penutupan Renja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.06.08.	Facilitasi Kunjungan Tamu			BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	22 Laporan	22 Laporan	14.010.000,00	14.010.000,00	0,00
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	92.593.200,00	123.081.500,00	30.488.300,00
0.00.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	24.364.000,00	24.364.000,00	0,00
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	-	0,00	0,00	0,00	

Pendataan Renja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-		0,00	0,00	0,00
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	1 BA	1.103.455.100	1.281.514.500,00	178.059.400,00	
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	312.288.000,00	342.438.000,00	30.150.000,00	
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Laporan	46 Laporan	222.519.100,00	265.317.000,00	42.797.900,00	

Penutupan Renja BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	568.648.000,00	673.759.500,00	105.111.500,00
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	1 BA	217.993.600,00	507.968.000,00	289.974.400,00	
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	111.540.000,00	111.540.000,00	0,00	
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	61.317.600,00	61.292.000,00	(25.600,00)	

Pendapatan Revisi BKAD Tahun 2023



0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	25.175.000,00	260.175.000,00	235.000.000,00
0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	19.961.000,00	74.961.000,00	55.000.000,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										6.027.410.400,00	8.278.890.500,00	2.251.480.100,00
5.02.	KEUANGAN										6.027.410.400,00	8.278.890.500,00	2.251.480.100,00



5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih			Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	100 Prosen	100 Prosen	1.166.885.000,00	2.067.957.900,00	901.072.900,00
		Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih			Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	100 Prosen	100 Prosen	827.316.200,00	999.056.600,00	171.740.400,00
		Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih			Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	100 Prosen	100 Prosen	508.449.600,00	595.146.500,00	86.696.900,00
		Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih			Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP	100 Prosen	100 Prosen	1.166.402.700,00	1.231.482.800,00	65.080.100,00

Pendapatan Renja BKAD Tahun 2023



		Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih			Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelolaan keuangan daerah	100 Prosen	-	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 BA	1 BA	1.994.201.200,00	3.067.014.500,00	1.072.813.300,00		
5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		BKAD Kabupaten Cirebon (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD Kabupaten Cirebon (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	267.332.000,00	354.002.000,00	86.670.000,00	
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		BKAD Kabupaten Cirebon (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD Kabupaten Cirebon (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	155.039.200,00	345.832.200,00	190.793.000,00	

Penutupan Revisi BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.01.03.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	74 Dokumen	74 Dokumen	113.184.000,00	172.712.600,00	59.528.600,00
5.02.02.2.01.04.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD			BKAD Kab. Cirebon	BKAD Kab. Cirebon	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	178 Dokumen	178 Dokumen	199.885.000,00	280.417.500,00	80.532.500,00
5.02.02.2.01.05.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	74 Dokumen	74 Dokumen	32.410.000,00	32.410.000,00	0,00
5.02.02.2.01.06.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	178 Dokumen	178 Dokumen	121.249.800,00	94.873.700,00	(26.376.100,00)

Penutupan Renja BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	311.292.600,00	479.941.200,00	168.648.600,00
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	10 Dokumen	506.181.400,00	623.765.400,00	117.584.000,00
5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	10 Dokumen	246.010.400,00	343.077.500,00	97.067.100,00
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	-	0,00	0,00	0,00

Penutupan Renja BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.01.13.	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	269 Orang	269 Orang	41.616.800,00	339.982.400,00	298.365.600,00
5.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 BA	1 BA	508.449.600,00	595.146.500,00	86.696.900,00
5.02.02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	136.044.000,00	136.044.000,00	0,00
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	444 Dokumen	444 Dokumen	53.388.000,00	103.960.000,00	50.572.000,00

Pendapatan Revisi BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.02.04.	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	-		0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	6 Dokumen		55.508.800,00	91.633.700,00	36.124.900,00
5.02.02.2.02.06.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	4 Dokumen		136.637.600,00	136.637.600,00	0,00

Pendapatan Renja BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	3 Laporan	-	0,00	0,00	0,00
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai					
5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	2 Dokumen	-	0,00	0,00	0,00

Pembulan Renja BKAD Tahun 2023



					Optimalisasi Kas	Optimalisasi Kas						
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	876 Dokumen	876 Dokumen	126.871.200,00	126.871.200,00	0,00
5.02.02.2.02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	222 Orang	-	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 BA	1 BA	1.166.402.700,00	1.231.482.800,00	65.080.100,00

Pembelan Rerja BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	3 Laporan	3 Laporan	60.330.000,00	60.330.000,00	0,00
5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	876 Dokumen	876 Dokumen	370.139.500,00	370.139.500,00	0,00
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	35.954.000,00	35.954.000,00	0,00
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan	226.371.200,00	226.371.200,00	0,00

Pendapatan Renja BKAD Tahun 2023



5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	178.896.000,00	178.896.000,00	0,00
5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	21.660.000,00	21.660.000,00	0,00
5.02.02.2.03.09.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00



5.02.02.2.03.10.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	178.252.000,00	243.332.100,00	65.080.100,00
5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	255 Orang	-	0,00	0,00	0,00
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH	Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih			Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan dimanfaatkan dengan baik/benar	Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan dimanfaatkan dengan baik/benar	100 Prosen	100 Prosen	651.180.300,00	1.098.136.200,00	446.955.900,00
		Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih			Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar	Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar	100 Prosen	100 Prosen	1.707.176.600,00	2.287.110.500,00	579.933.900,00

Pendataan Renja BKAD Tahun 2023



		Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih			Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelolaan barang milik daerah	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelolaan barang milik daerah	100 Prosen	-	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah				Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 BA	1 BA	2.358.356.900,00	3.385.246.700,00	1.026.889.800,00	
5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	118.070.900,00	151.425.700,00	33.354.800,00
5.02.03.2.01.02.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	112.482.800,00	17.549.300,00	(94.933.500,00)

Penutupan Rerja BKAD Tahun 2023



5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	83.093.300,00	99.762.600,00	16.669.300,00
5.02.03.2.01.04.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	94.794.000,00	94.794.000,00	0,00
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah				BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	74 Laporan	74 Laporan	248.365.000,00	248.842.400,00	477.400,00
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah				BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	74 Laporan	74 Laporan	85.467.200,00	99.861.700,00	14.394.500,00

Penutupan Rujak BKAD Tahun 2023



5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	651.180.300,00	1.098.136.200,00	446.955.900,00
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	398.987.600,00	513.987.600,00	115.000.000,00
5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	94.055.000,00	94.055.000,00	0,00
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	146.781.000,00	496.781.000,00	350.000.000,00

Penulisan Rujukan BKAD Tahun 2023



5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	876 Laporan	876 Laporan	151.552.400,00	151.552.400,00	0,00
5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan	65.286.800,00	65.286.800,00	0,00
5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	364 Orang	364 Orang	108.240.600,00	253.212.000,00	144.971.400,00
JUMLAH										15.147.812.480,00	18.521.916.303,00	3.374.103.823,00

Pembakuan Rujuk BKAD Tahun 2023



Renja BKAD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra BKAD Tahun 2019-2024 yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2023. BKAD melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai indikator kinerja utama (IKU) BKAD Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BKAD Tahun 2019-2024.

Berdasarkan telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 serta memperhatikan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD, maka pada Tahun 2023 rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan sebanyak 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 64 (enma puluh empat) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.18.521.916.303,00 Seluruh anggaran program dan kegiatan serta sub kegiatan BKAD Tahun 2023 bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif BKAD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel. 3.4
Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
0	NON URUSAN	10.243.025.803,00
0.00.	NON BIDANG URUSAN	10.243.025.803,00
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.243.025.803,00
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.455.500,00
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.032.400,00
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.596.600,00
0.00.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.328.600,00
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.838.000,00
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.659.900,00
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.312.359.403,00



0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.285.283.603,00
0.00.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.346.800,00
0.00.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.320.800,00
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.772.600,00
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.635.600,00
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.152.000,00
0.00.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.442.000,00
0.00.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.310.000,00
0.00.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.400.000,00
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.029.576.400,00
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.987.400,00
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	424.905.300,00
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.200,00
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.246.000,00
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.600.000,00
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	347.384.000,00
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.010.000,00
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.081.500,00
0.00.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.364.000,00
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.281.514.500,00
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342.438.000,00
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	265.317.000,00
0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.759.500,00
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.968.000,00
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.540.000,00
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.292.000,00



0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	260.175.000,00
0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.961.000,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.278.890.500,00
5.02.	KEUANGAN	8.278.890.500,00
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.893.643.800,00
5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.067.014.500,00
5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	354.002.000,00
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	345.832.200,00
5.02.02.2.01.03.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	172.712.600,00
5.02.02.2.01.04.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	280.417.500,00
5.02.02.2.01.05.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	32.410.000,00
5.02.02.2.01.06.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	94.873.700,00
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	479.941.200,00
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	623.765.400,00
5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	343.077.500,00
5.02.02.2.01.13.	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	339.982.400,00
5.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	595.146.500,00
5.02.02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	136.044.000,00
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	103.960.000,00
5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	91.633.700,00
5.02.02.2.02.06.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	136.637.600,00
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	126.871.200,00
5.02.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.231.482.800,00
5.02.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	60.330.000,00



5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	370.139.500,00
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	35.954.000,00
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	226.371.200,00
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	178.896.000,00
5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	21.660.000,00
5.02.02.2.03.09.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	94.800.000,00
5.02.02.2.03.10.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	243.332.100,00
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.385.246.700,00
5.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.385.246.700,00
5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	151.425.700,00
5.02.03.2.01.02.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	17.549.300,00
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	99.762.600,00
5.02.03.2.01.04.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	94.794.000,00
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	248.842.400,00
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	99.861.700,00
5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.098.136.200,00
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	513.987.600,00
5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	94.055.000,00
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	496.781.000,00
5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	151.552.400,00
5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	65.286.800,00
5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	253.212.000,00
J U M L A H		18.521.916.303,00



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja BKAD Tahun 2023 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja BKAD Tahun 2023 yaitu untuk merumuskan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Tahun 2023 sangat terbatas, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas dalam pelaksanaannya sehingga dapat selesai sesuai dengan rencana aksi dan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Renja ini, dapat diketahui capaian kinerja dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sehingga dapat dilaksanakan percepatan dalam pencapaian target kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya dokumen Perubahan Renja ini, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.

Sumber, Juli 2023
KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

SRIWIJAYAWATI, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja BKAD Tahun 2023 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja BKAD Tahun 2023 yaitu untuk merumuskan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Tahun 2023 sangat terbatas, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas dalam pelaksanaannya sehingga dapat selesai sesuai dengan rencana aksi dan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Renja ini, dapat diketahui capaian kinerja dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sehingga dapat dilaksanakan percepatan dalam pencapaian target kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya dokumen Perubahan Renja ini, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 September 2023
Nomor : 051.2 / 1236 / Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

27/9/23

Berdasarkan Pasal 139 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, dan setelah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina, (IV/a)

NIP. 19740530 199803 2 005